

**DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM MENGHADAPI
KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PRODUK LAUT OLEH
TIONGKOK**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

**NADIRA NABILA
2110851015**

Pembimbing:

**Dr. Apriwan, MA
Silvi Cory, S.Pd, M.Si**



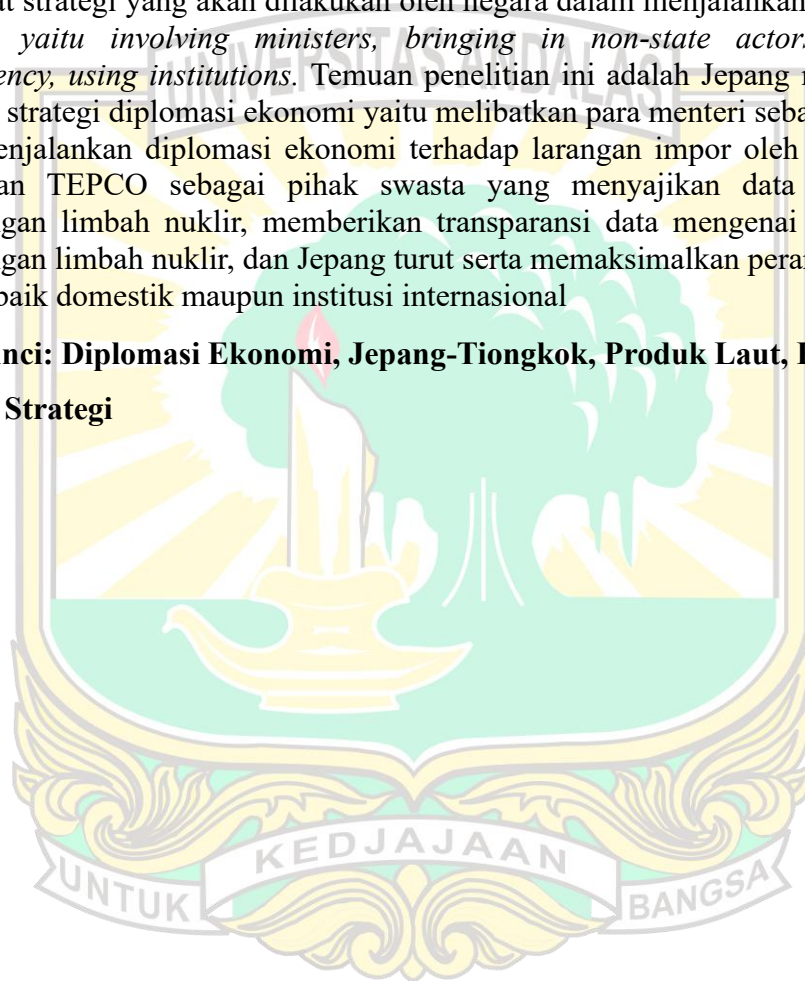
**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Pembuangan limbah nuklir Fukushima yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2023 memberikan hambatan baru dalam hubungan dagangannya dengan Tiongkok. Sebagai bentuk penolakan tegas terhadap keputusan Jepang ini, pada Agustus 2023, Tiongkok memberlakukan kebijakan larangan impor produk laut Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis diplomasi ekonomi Jepang menggunakan konsep diplomasi ekonomi oleh Stephen Woolcock dan Nicholas Bayne yang menyebutkan terdapat ada empat strategi yang akan dilakukan oleh negara dalam menjalankan diplomasi ekonomi yaitu *involving ministers, bringing in non-state actors, greater transparency, using institutions*. Temuan penelitian ini adalah Jepang melakukan beberapa strategi diplomasi ekonomi yaitu melibatkan para menteri sebagai utusan untuk menjalankan diplomasi ekonomi terhadap larangan impor oleh Tiongkok, melibatkan TEPCO sebagai pihak swasta yang menyajikan data mengenai pembuangan limbah nuklir, memberikan transparansi data mengenai keamanan pembuangan limbah nuklir, dan Jepang turut serta memaksimalkan peran beberapa institusi baik domestik maupun institusi internasional

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Jepang-Tiongkok, Produk Laut, Hubungan Dagang, Strategi



ABSTRACT

Japan's disposal of the Fukushima nuclear waste in 2023 has created a new obstacle in its trade relations with China. As a form of firm rejection of this Japanese decision, in August 2023, China imposed a policy of banning the import of Japanese marine products. This research aims to find out and analyze Japan's economic diplomacy in facing China's seafood import ban policy in 2023. This research uses qualitative methods with descriptive research types to analyze Japan's economic diplomacy using the concept of economic diplomacy by Stephen Woolcock and Nicholas Bayne which states that there are four strategies to be carried out by countries in carrying out economic diplomacy, namely involving ministers, bringing in non-state actors, greater transparency, using institutions. The findings of this study are that Japan carried out several economic diplomacy strategies, namely involving ministers as envoys to carry out economic diplomacy against China's import ban, involving TEPCO as a private party that presents data on nuclear waste disposal, providing data transparency regarding the safety of nuclear waste disposal, and Japan participated in maximizing the role of several institutions both domestic and international institutions.

Keywords: *Economic Diplomacy, Japan-China, Marine Products, Trade Relations, Strategy*

